



---

## **INTEGRITAS KEPEMIMPINAN DESA, UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA DANA DESA DI KABUPATEN BIREUEN**

Novita Sari<sup>1</sup>, Muliawati<sup>2</sup>, Siti Hardiyanti<sup>3</sup>, Nurul Fajri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Syiah Kuala

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima :

7 Maret 2023

Disetujui :

29 Maret 2023

Dipublikasikan:

2 April 2023

*Keywords:*

*Integrity,*

*Village Leadership,*

*Corruption,*

*Prevention.*

---

### **Abstrak**

Penelitian yang berjudul *Integritas Kepemimpinan Desa, Upaya Pencegahan Korupsi Pada Dana Desa Di Kabupaten Bireuen*, peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi sejauh mana pengaruh integritas sosok kepemimpinan kepala desa di Kabupaten Bireuen melakukan komitmen untuk tidak melakukan perbuatan korupsi dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, serta yang dilakukan kepemimpinan kepala desa untuk melakukan pencegahan korupsi dana desa yang bisa merugikan uang negara. Selama ini banyak kasus kepemimpinan desa yang krisis integritas terhadap mengelola uang negara, ada beberapa kepala desa di Bireuen yang sudah terjerat kasus hukum mengenai pidana korupsi dana desa. Penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan model Induktif Penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi dana desa di Bireuen terjadi, bukan karena disebabkan kurangnya pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kepala desa. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa yaitu karena tidak memiliki integritas personal yang kuat dalam kepemimpinan desa. Adapun integritas tersebut berupa *honesty* (jujur), *keeping promise* (menepati janji), *loyalty* (loyalitas), *responsibility* (tanggung jawab) dan *fairness* (keadilan). Untuk pencegahan korupsi dana Desa di Bireuen ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan psikologis dan *local wisdom*.

---

## **INTEGRITY OF VILLAGE LEADERSHIP, EFFORTS TO PREVENT CORRUPTION IN VILLAGE FUNDS IN BIREUEN REGENCY**

---

### **Abstract**

*The research entitled Integrity of Village Leadership, Efforts to Prevent Corruption in Village Funds in Bireuen Regency, the researchers aimed to obtain information on the influence of the integrity of the leadership figure of the village head in Bireuen Regency to commit to not commit acts of corruption in managing village funds sourced from the APBN, and carried out by the leadership of the village head to prevent corruption in village funds that could harm state money. So far, there have been many cases of village leadership having integrity crises in managing state money, there are several village heads in Bireuen who have been ensnared in legal cases regarding the corruption of village funds. In this study, the researcher used a qualitative method in the form of a participant observation approach, where the researcher himself became the main*

---

*instrument in collecting data in the field. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation and literature study. The results showed that cases of corruption in village funds in Bireuen occurred, not because of a lack of supervision and law enforcement against village heads. Another factor that causes corruption in village funds is that they do not have strong personal integrity in village leadership. The integrity is in the form of honesty, keeping promises, loyalty, responsibility and fairness. There are two approaches to preventing village fund corruption in Bireuen, namely the psychological approach and local wisdom.*

© 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

[muliawati@unsyiah.ac.id](mailto:muliawati@unsyiah.ac.id)<sup>2</sup>, [nurulfajri@usk.ac.id](mailto:nurulfajri@usk.ac.id)<sup>4</sup>

## PENDAHULUAN

Secara harfiah pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu (Kartini Kartono, 2018: 34). Ada ilmuan-ilmuan yang cenderung mengemukakan sederetan kualitas-kualitas unggul dan sifat-sifat utama yang dimiliki setiap pemimpin. Misalnya dia, harus memiliki intelegensi tinggi, mampu mengambil kebijaksanaan yang tepat, mempunyai rasa humor, mampu memikul tanggung jawab, tepat sasara, bisa bertindak adil dan jujur, memiliki keterampilan teknis tinggi, keberibadian imbang dan seterusnya (Kartini Kartono: 34).

Kepemimpinan sebuah konsep sistem pada sebuah organisasi yang bersifat kecil maupun sampai pada sektor yang luas. Misalnya kepemimpinan yang terdapat pada keluarga, desa kota, dan negara. Konsep kepemimpinan pada sebuah institusi lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah pemimpin idealnya harus memiliki nilai tanggung jawab moral dan nilai keteladanan yang tentunya bisa menjalankan roda kepemimpinan dengan baik. Pemimpin yang baik dalam sebuah institusi sangat diharapkan semua orang maupun golongan, yang bisa membawa peningkatan sumber daya manusia serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk menjalankan kepemimpinan yang baik sangat dibutuhkan integritas (inegrity), integritas yang artinya, keutuhan, kejujuran, ketulusan hati. Secara konseptual pemimpin itu harus bersifat terbuka, merasa utuh bersatu, sejiwa dan seperasaan dengan anak buahnya; bahkan senasib dan sepenanggungan dalam satu perjuangan yang sama. Karena itu dia bersedia memberikan pelayanan dan pengorbanan kepada para pengikutnya. Sedang kelompok yang dituntun menjadi semakin percaya dan semakin menghormati pemimpinnya. Dengan segala ketulusan hati dan kejujuran, pemimpin memberikan ketauladanan, agar dia dipatuhi dan ditakuti oleh anggota kelompoknya.

Pentingnya sebuah integritas dalam kepemimpinan ini sangat dibutuhkan dalam upaya penindakan, dan pencegahan korupsi Indonesia. Korupsi di Indonesia yang sudah sistemik dan teroganisir tentunya ini menjadi persoalan bangsa. Persoalan korupsi ini yang akut dipengaruhi oleh peran pemimpin dalam kebiasaan melakukan perbuatan korupsi pada sebuah lembaga yang dia pimpin. Dalam hal ini tentunya pemimpin memiliki peran strategis dalam praktek korupsi maupun melawan, dan mencegah perbuatan amoral tersebut.

Diberitakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Aceh, melimpahkan kasus dugaan korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp. 296 juta ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa tersangka menarik dana desa tidak sesuai dengan ketentuan. Tersangka tidak

dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, baik secara administrasi maupun fisik."Untuk kegiatan fisik, tersangka JAS melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bahkan ada kegiatan fisik fiktif, sehingga dugaan sementara kerugian negara mencapai Rp 296 Juta" (<https://aceh.antarane.ws.com/berita>).

Kasus yang banyak terjerat akhir-akhir ini berasal dari kalangan kepala desa yaitu dengan kasus korupsi pengelolaan dana desa. Korupsi dana desa ini sangat rentan karena anggaran yang cukup besar, sebahagia oknum kepala desa dana ini diselewengkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kerugian akibat korupsi tentunya merugikan Negara dan serta pihak lain. Selain kerugian pada Negara, juga secara mental dapat merusak generasi bangsa akibat kebisaan pemimpin dalam perbuatan korupsi baik ditingkat desa sampai level yang atas.

Secara kontekstual, seharusnya desa sebagai lokomotif penggerak peningkatan sumberdaya manusia, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta desa juga menjadi alternatif strategi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia secara fundamental.

Secara konseptual strategi pemberantasan korupsi yang bersifat grass root ini sangat penting. Akibat perilaku korupsi ini tentunya merugikan negara maupun publik. Tentunya dengan anggaran yang fantastis besar ini tentunya harus dikelola kepala desa secara baik dan transparan. Untuk tidak terjadinya penyimpangan, dan penyelewengan dana desa tentunya instrumen yang terpenting adalah manajemen kepemimpinan desa yang transparan serta memiliki integritas kepemimpinan yang baik.

Integritas kepemimpinan itu sangat menentukan terhadap penyimpangan maupun penyelewengan dana desa yang terindikasi korupsi, karena integritas, bekerja atas kejujuran dan ketulusan hati dalam menjalankan tugas yang sedang diamanahkan. Kendatipun manajemen dalam sebuah lembaga desa bagus, tanpa integritas seorang pemimpin yang baik, tentunya perbuatan korupsi juga memiliki peluang.

Berdasarkan masalah, diperlukan upaya Integritas Kepemimpinan Desa, dalam upaya Pencegahan Korupsi Pada Dana Desa Di Kabupaten Bireuen, didasarkan peneliti memiliki alasan kuat dan sangat tertarik persoalan integritas kepemimpinan desa dalam pencegahan korupsi melalui mengelola dana desa. Adapun objek penelitian yang menjadi sampling adalah 10 (sepuluh) desa yang ada di Kabupaten Bireun. Desa-desa tersebut dipilih berdasarkan studi Pustaka yang dilakukan peneliti selama melakukan survei pra penelitian. Penelitian dilakukan untuk melihat sejauh mana integritas kepemimpinan desa di daerah tersebut dalam mengelola dana desa dengan baik dan komitmen terhadap pencegahan tindakan korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model Induktif Penelitian (Sumber: Creswell, 2017:90). Adapun pada penelitian ini, peneliti ingin melihat sejauh mana integritas kepemimpinan desa yang memiliki peranan penting dalam mengelola dana desa secara baik dan tidak terindikasi korupsi sesuai dengan UU Korupsi. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat relevansi integritas kepemimpinan terhadap perbuatan korupsi maupun pencegahan pada tingkat desa melalui program-program pembangunan desa melalui dana desa yang dikelola bersumber dari APBN. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu yang berkaitan dengan sifat unik dan realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri (Sanafiah, Faisal, 1990:2).

Pada penelitian kualitatif ini merujuk pada suatu teori baru yang menggunakan model induktif pemikiran atau logika. Pendekatan induktif memberi saran penempatan teori atau pola dalam pendekatan kualitatif. Dalam grounded theory, Strauss dan Corbin yang dikutip oleh Anne Lacey dan Donna Luff menyatakan bahwa pengembangan

sebuah teori bahagian dari puncak penelitian, yaitu sebuah teori yang di dasarkan pada data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pemimpin**

Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang memiliki kedudukan tinggi dalam kelas sosial. Lahirnya disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktor genetik. Biasanya pemimpin yang lahir dari faktor alamiah ini biasanya karena ada dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat ataupun adanya dukungan fenomena sosial yang terjadi.

Berbeda halnya dengan genetik ini biasanya pemimpin muncul dari faktor keturunan misalnya terdahulu orang tuanya pernah menjadi pemimpin dalam posisi tertentu sehingga bakat tersebut menurun kepada anaknya. Selain itu juga konsep pemimpin yang berasal dari kata "leader" dan "kepemimpinan" dari leadership. Pemimpin artinya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien.

Untuk dapat terjadinya kegiatan organisasi diperlukan pengaturan, pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lain. Pemimpin dapat diartikan predikat yang disandang seseorang sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan, maka pemimpin harus melaksanakan tugas yang diembannya.

Menurut Kouzes (2004:17), mengatakan bahwa pemimpin adalah pionir sebagai orang yang bersedia melangkah kedalam situasi yang tidak diketahui. Pemimpin yang memiliki visi jelas menjadi penuntun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Sedangkan pemimpin dalam era post modern Lanttu dalam bukunya (2007:29), menyatakan bahwa pemimpin adalah pelayan. Definisi tersebut sangat memiliki korelasi realitas yang sedang terjadi pada saat ini, pemimpin yang dilayani, bukan melayani. Secara konkritnya pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya

Pada sistem sosial pemimpin ini merupakan ujung tombak terhadap berjalannya struktur kekuasaan yang paling tinggi dalam masyarakat misalnya struktur yang terkecil seperti Desa yang dipimpin oleh kepala desa. Secara legitimasi kepemimpinan dalam kehidupan sosial sudah diatur dalam undang-undang serta sebagai bagian dari sistem administrasi pemerintahan. Majunya sebuah sistem pemerintahan dipengaruhi juga oleh gaya kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin secara formal terbentuk dalam hierarki kekuasaan yang sering disebut dengan kepemimpinan.

Kepemimpinan disini dimaksud adalah bentuk sistem kekuasaan yang berjalan dari bahagian bawah sampai yang paling tinggi. Adapun pengertian kepemimpinan beberapa pakar mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Kootz & O'donne (1984) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.
2. Goerge R. Terry (1960) kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.
3. Slamet (2012) kepemimpinan merupakan suatu kemampuan proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.
4. Thoaha (1983), kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. (Moeheriono, 2012:382)

Berhasilnya seorang pemimpin dapat diukur melalui indikator sistem kepemimpinan yang dijalankan. Hal tersebut memiliki alasan karena sosok pemimpin itu juga dilihat aspek kemampuan dalam bidang perencanaan program, manajemen organisasi, transparan dan mampu membangun komunikasi yang baik. Hal tersebut sangat terkait dengan integritas personal seseorang dalam memimpin.

### **Kepemimpinan Desa di Bireun**

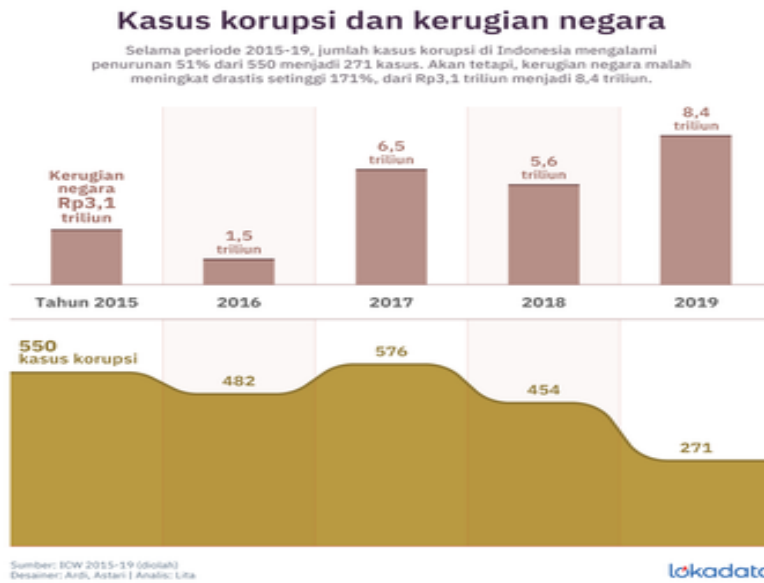
Secara administratif Kabupaten Bireun memiliki 609 desa yang terdiri dari 18 Kecamatan. Desa atau disebut dengan Gampong dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa. Pada umumnya kepemimpinan desa di Kabupaten Bireun sangat memiliki peran aktif dalam urusan bidang sosial dan pembangunan Desa. Peran aktif desa di Kabupaten Bireun tidak terlepas dari sistem kepemimpinan desa yang dipimpin oleh kepala desa atau Geuchik yang memiliki berbagai program. Misalnya saja kepala desa mengintruksikan untuk membersihkan atau membuat aliran irigasi pengairan persawahan yang berdasarkan hasil musyawarah tingkat gampong, masyarakat harus mengikutinya.

Pemerintah desa di Bireun juga melakukan intruksi pelarangan hewan ternak yang berkeliaran pada musim menanam padi, supaya bertujuan untuk tidak merusak tanaman padi warga di area persawahan. Selain kegiatan partisipatif sosial, kepala desa di Bireun juga sangat aktif dalam hal kegiatan keagamaan seperti memperingati maulid Nabi Muhammd SAW, yang biasanya setiap tahun sekali diperingati, dalam konteks masyarakat Aceh kegiatan ini sangat sakral hampir diseluruh Kabupaten di Aceh memperingatinya.

Kepala desa di Kabupaten Bireun selama ini sudah memiliki kemajuan yaitu sudah mulai terlibat dalam program sosial, pemberdayaan ekonomi dan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan wawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa secara filosofis kepemimpinan desa sangat berjalan baik dan kepala desanya memiliki berbagai program mulai dari pengembangan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan. Akan tetapi pasca adanya dana desa banyak kepala desa di Bireun yang bermasalah dengan hukum akibat penggelapan dana desa dan tindak pidana. Dana yang cukup besar tersebut ternyata memberikan peluang kepala desa untuk melakukan korupsi.

Banyaknya kepala desa bermasalah dengan hukum dan sebagainya ada yang menjadi tersangka ini tentunya memiliki persoalan transparansi dan persoalan integritas kepemimpinan desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan data ICW berikut diagramnya sebagai berikut:



**Gambar 1.** Diagram Kasus Korupsi dan Kerugian Negara Periode 2015 – 2019.  
Sumber: Lokadata (2020)

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa selama empat tahun kasus korupsi mulai menurun akan tetapi kerugian negara tetap melonjak hampir 3 kali lipat dari 3,1 Triliun menjadi 8,4 triliun selama 2015-2019. Korupsi menurut Ekonom UGM Rimawan Pradipto selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menimbulkan biaya sosial yang turut ditanggung publik (lokadata.id/ diakses 04 Agustus 2021).

Tingginya anggaran dana desa membuat keuchik atau kepala desa memanfaatkan peluang untuk melakukan korupsi. Hal tersebut tidak hanya murni ada keinginan dari kepala desa juga, melainkan ada juga terlibat pihak ketiga dalam hal intervensi kepala desa dalam program sehingga menyebabkan terjadi pelanggaran dalam penggunaan anggaran desa seperti kasus baru baru ini terjadi di Bireun mengenai kasus Bimtek. Seperti yang diungkapkan Koalisi NGO HAM Aceh menduga telah terjadi penyalahgunaan dana desa yang masif di Kabupaten Bireun. dugaan penyalahgunaan tersebut berupa kegiatan Bimtek (bimbingan teknis).

Menurut lembaga tersebut, kegiatan Bimtek ini menghabiskan biaya paling sedikit sekitar 58 miliar yang berasal dari 609 gampong. Temuan koalisi NGO HAM tersebut berawal dari laporan masyarakat gampong yang meresakan dana desa tidak diberikan manfaat apa-apa bagi gampong. Hal ini menyebabkan belanja publik gampong telah dimanfaatkan secara melawan hukum oleh aparat gampong yang bekerjasama dengan pihak-pihak lembaga berkedok lembaga pelatihan. Berdasarkan analisa Koalisi NGO HAM Aceh, ditemukan dugaan kuat penyelewengan dana desa dengan penyalahgunaan kewenangan.

Penyalahgunaan tersebut mulai dari pejabat negara, muspida plus dan muspika plus, serta keterlibatan aparat desa dengan mengatasnamakan BKAG (Badan Kerjasama Antar Gampong) (<http://aceh.tribunnews.com>, diakses 6 Agustus 2021).

Jika melihat konteks kasus korupsi di Aceh, ada beberapa keuchik di Bireun bermasalah dengan hukum sampai ke pengadilan, seperti ungkapan kepala seksi intelijen kejar Bireun Fri Wisdom S Sumbayak, menyebutkan kepala desa paya lipah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun priode 2017-2018. Adapun kerugian negara sekitar 231,8 Juta yang dilakukan oleh keuchik paya lipah. (nusadaily.com, diakses 4 Agustus 2001)

Kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang menyebutkan ada dugaan penggunaan dana desa tidak sesuai peruntukkan. Dari informasi tersebut, Kejari Bireun membentuk tim untuk menyelidiki. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan penggunaan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Paya Lipah tahun anggaran 2017 dan 2018 yang tidak sesuai, diantaranya beberapa pembangunan fisik yang diduga menyalahi aturan serta pembangunan dana badan usaha milik Gampong BUMG tidak sesuai ketentuan. (nusadaily.com diakses 4 Agustus 2021).

Rapuhnya sistem kepemimpinan dalam pengelolaan anggaran desa membuat rentan kepala desa terjerat dengan kasus korupsi. Selama ada anggaran desa ini desa sudah mulai aktif sudah ada program, maupun pembangunan. Akan tetapi sering juga didapati kepala desa juga kurang terbuka masalah anggaran yang digunakan ada permainan yang dilakukan. Akan tetapi masyarakat tidak bisa bersuara karena tidak ada bukti yang kuat, serta tidak adanya pengawasan mengenai penggunaan anggaran.

Terjeratnya kasus korupsi beberapa kepala desa di Kabupaten Bireun tidak dapat hanya dilihat dari konteks hukum melainkan dilihat juga dari aspek begitu kuatnya kepentingan pihak-pihak terkait terhadap anggaran dana desa tersebut, hal ini disebabkan karena kepala desa bisa mengelola dana desa yang cukup besar mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Keterlibatan pihak ketiga atau kekuatan birokrasi yang ingin mengintervensi kepemimpinan desa dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap terjadinya tindakan pidana korupsi.

Menurut Hellman (2000:2-4), bahwa jumlah uang yang besar terhadap kebutuhan kekuasaan negara tidak hanya memperoleh dan tetap dalam kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan pengaruh terhadap birokrasi publik, kemudian undang-undang, peraturan dan kebijakan dibeli untuk kekuasaan ekonomi. Berdasarkan pandangan ahli diatas jelas kepentingan juga memiliki kontribusi terhadap praktek korupsi yang menjerat kepala desa di kabupaten Bireun berdasarkan hierarki kekuasaan yang dimiliki.

### **Pengaruh Integritas Pemimpin Desa dalam pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Bireuen**

Untuk pencegahan korupsi pada tingkat Desa di Kabupaten Bireun tidak hanya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan dana desa melainkan perlu adanya integritas kepemimpinan. Integritas tersebut merupakan benteng terdepan dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Bireun. Ada beberapa integritas yang perlu kepemimpinan desa di Bireun dalam pencegahan korupsi dana desa.

#### **Honesty (kejujuran)**

Menurut Becker (2009) integritas pribadi adalah konsistensi antara prinsip pribadi seseorang dan rasa hormat moral kepada orang. Hal ini menuntut kedua komitmen untuk membentuk diri sebagai subyek moral (seperti apa kita seharusnya) dan untuk membiarkan otonomi moral orang lain. Lebih lanjut Becker (2009) menegaskan bahwa integritas pribadi adalah kewajiban moral untuk menghormati orang lain sebagai manusia dan standar moral terhadap semua orang untuk menilai apakah seseorang bermoral atau tidak.

Pengertian diatas, dapat dimengerti bahwa istilah integritas memiliki beberapa kata kunci, yaitu kejujuran, keadaan sebenarnya, ketulusan, ketelitian, dapat dipercaya, kesempurnaan, keselarasan, keselamatan, dan konsistensi. Dengan kata kunci ini maka integritas pribadi dapat diartikan kesesuaian antara perkataan dan perlakuan yang ditandai dengan kejujuran, ketulusan, dan konsistensi.

Kepala desa di Bireun mencoba untuk membuka celah tidak jujur dalam bekerja dengan memanfaatkan ketidakmertian masyarakat tentang anggaran-anggaran yang bisa dan tidak bisa dialokasikan oleh anggaran dana desa. Sejalan dengan permasalahan ini (Rahman, 2006) *behavior event interview* yang menguraikan

kecenderungan integritas seseorang. Apakah alat ukur ini integritas pribadi dapat dilihat sebagai sebuah *trait* (sifat) atau *state* (kondisi) individu. Dari sikap kepala desa tersebut tidak memiliki transparansi building.

#### **Keeping Promise (menepati janji)**

Menurut Phill Pringle (2001), menepati janji merupakan integritas walaupun merugikan anda. Pandangan ahli tersebut memberikan pandangan bahwa pemimpin harus memiliki sikap menepati janji walaupun dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Mengenai integritas kepemimpinan desa selalu menjadi persoalan ditengah masyarakat, hal ini biasanya ketika pada musim pemilihan kepala desa.

Pada saat kampanye pemilihan kepala desa menyebutkan bahwa beberapa janji politik yang telah dijanjikan oleh kepala desa kepada masyarakat supaya kepala desa terpilih, salah satunya adalah akan memimpin desa untuk kepentingan masyarakat bukan karena kepentingan individu atau golongan. Fakta dilapangan pada saat pemilihan dulu kepala desa sudah berjanji lebih baik lagi dalam memimpin desa, serta berjanji akan bersikap transparan dan terbuka mengenai anggaran desa, agar desa ini lebih baik lagi dalam pembangunan desa.

Selain itu juga menguraikan satu persatu masalah yang dihadapi desa, dan dia memberikan solusi terbaiknya, agar supaya masyarakat memilihnya kembali. Pemimpin desa yang tidak menepati janji ini sangat berbahaya dan riskan karena kepala desa merupakan pilar utama menjalankan program desa berdasarkan anggaran desa yang terbilang besar anggarannya.

#### **Loyalty (loyalitas)**

Tinjauan loyalitas dari seorang kepala desa merupakan salah satu bagian dari integritas seorang kepala desa, integritas selalu berkaitan dengan loyalitas karena loyalitas bisa didapatkan ketika seseorang pemimpin mempunyai integritas. Kepala desa telah melakukan sesuai dengan prosedur dan telah terlihat dengan jelas loyalitas kepemimpinan kepala desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Walaupun beberapa perangkat desa dengan sendirinya mengelak tentang mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan penganggaran desa. Mereka hanya dilibatkan dalam proses perencanaan saja.

Tidak loyal masyarakat kepada pemimpin desa ini karena ada upaya tidak transparan yang sehingga memiliki potensi korupsi, apabila semua loyal kepada pemimpin desa ini bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan anggaran desa secara sistemik.

#### **Responsibility (tanggung jawab)**

Konsep pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang diemban sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Pemimpin desa harus memiliki tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang ada di desa berupa persoalan sosial, ekonomi dan pembangunan. Selama ini kapala desa atau keuchik gampong sudah ditambahkan beban oleh pemerintah pusat dengan memajukan desa dengan menggunakan anggaran desa yang sudah diplotkan melalui APBN.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa yang menggunakan anggaran desa, keuchik harus memiliki tanggung jawab penuh dalam partisipasi pemanfaatan dan pengawasan dana desa yang digunakan. Tanggung jawab ini tidak hanya menjalankan program desa melainkan juga kepala desa juga sebagai bahagian pengawas anggaran desa.

Keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam pengawasan anggaran desa ini seacara filosofis dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa yang bersumber dari Negara. Upaya yang dilakukan kepala desa dalam pencegahan korupsi dana desa di Bireun sebageian memasang baliho mengenai jumlah anggarn desa yang ditransfer serta biaya yang digunakan, baliho tersebut ditempel di depan kantor desa supaya dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat setempat.

Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin untuk mencegah korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.

### **Fairness (keadilan)**

Keadilan adalah bahagian dari distribusi sosial yang dianggap penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Idealnya keadilan tidak bisa dipahami secara awam yaitu bagi rata atau pemerataan melainkan keadilan adalah bentuk pembagian secara proporsional dalam berbagai kebijakan. Menurut John Rawls keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan.

Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asal atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asal ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu. (John Rawls, 2011:13)

Dalam bentuk kebijakan proporsional tentunya pemimpin memiliki kejelasan prioritas dalam program. Kejelasan tentang mana prioritas dan mana yang pendukung harus jelas baru keadilan bisa tercapai, banyak fenomena yang terjadi dilapangan ketidak jelasan apa yg menjadi prioritas desa dan mana yang menjadi penunjang sehingga memicu terjadinya korupsi.

Selain itu juga banyak ketidak pahaman terhadap anggaran desa yang terjadi didesa yang membuat menjadi indikasi terjadinya korupsi yang tidak disengaja. Untuk membantu memperjelas semua itu diperlukan analisis atau bantuan akademisi dalam membantu memperjelaskan bagaimana anggaran desa seharusnya diprioritas sesuai aturan dan terciptanya keadilan.

## **Pendekatan Pencegahan Korupsi dalam Integritas Kepemimpinan Desa**

### **Pendekatan Psikologis**

Pendekatan kejiwaan dalam membentuk integritas kepemimpinan sangat membantu dalam hal menjalankan roda kepemimpinan. Karena kejiwaan ini merupakan bahagian sentral yang tubuh manusia yang mampu mengendalikan emosi seseorang dalam hal bertindak sesuai dengan akal yang sehat dan fikiran jernih. Akal sehat dan fikiran jernih dalam sistem kepemimpinan sangat membantu untuk mendukung berbagai program dan kinerja yang baik.

Dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Bireun memiliki jiwa dan mental yang kuat, sehingga sulit untuk di intervensi siapapun dalam hal menjalankan program maupun kebijakan, kuatnya mental pemimpin desa di Aceh ini tidak terlepas dari bentukan kondisi masa konflik. Efek konflik pada masa DOM dan DOM membuat masyarakat Aceh lebih kuat mental dan kejiwaannya.

Pemimpin desa sangat diperlukan jiwa yang sehat dan mental yang kuat karena kepala desa sangat besar tanggung jawabnya terhadap program desa dan pengelolaan anggaran desa yang cukup tinggi sampai ratusan juta bahkan milyaran per desa ditransfer melalui anggaran APBN. Secara psikologis pemimpin desa menghadapi berbagai polemik dan dinamika masalah dengan pengelola anggaran desa yaitu adanya intervensi pihak-pihak tertentu

Hal tersebut mengakibatkan adanya penyimpangan dalam anggaran dana desa, sehingga terjadi praktek korupsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya pemimpin desa di Kabupaten Bireun yang berani dan tegas untuk tidak menyimpang dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bertujuan untuk adanya kemajuan dan kesejahteraan di desa.

### **Pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*)**

Pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*) yang terkait dengan integritas pribadi. Kearifan local ini dapat diformulasikan dalam bentuk sifat-sifat yang bisa

menggambarkan tingkat integritas yang tinggi bagi individu dengan memperhatikan keragaman budaya dan etnis di Indonesia.

Kearifan lokal di Aceh sangat kental dan dipengaruhi juga oleh nilai relegiusitas dalam pribadi seseorang. Nilai relegiusitas ini sangat mempengaruhi terhadap ruang gerak terhadap perilaku korupsi pada dana desa. Karena dalam ajaran Islam melakukan korupsi sama saja dengan mencuri. Berdasarkan kearifan lokal Aceh perbuatan mencuri adalah sebuah perbuatan yang sangat hina bahkan bisa dianggap aib. Bahkan perbuatan ini dianggap sebagai penyakit masyarakat, bisa dikucilkan bahkan di usir.

## PENUTUP

Untuk pencegahan korupsi pada tingkat Desa di Kabupaten Bireun tidak hanya pengawasan dan penegakan hukum semata dalam pengelolaan dana desa melainkan perlu adanya integritas kepemimpinan yang dimiliki. Integritas tersebut merupakan upaya dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Bireun secara fundamental.

Fakta lapangan banyak kepala desa yang terjerat korupsi di Kabupaten Bireun, ternyata bermasalah pada integritas kepemimpinan berupa persoalan *honesty* (kejujuran), *keeping promise* (menepati janji), *loyalty* (loyalitas), *responsibility* (tanggung jawab), *fairness* (keadilan). Selain integritas kepemimpinan di Kabupaten Bireun dalam pencegahan korupsi dana desa di Bireun diperlukan juga pendekatan psikologi (kejiwaan), *local wisdom* dan Religius.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M. S. (2020, September 8). *Berita*. Retrieved from Aceh Antaranews: <https://aceh.antaranews.com/berita/159746/kejari-bireuen-segera-limpahkan-kasus-korupsi-dana-desa-ke-pengadilan>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian (Suatau Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Becker, G. (2009). Integrity As Moral Ideal And Business Benchmark. *Journal Of International Business Ethics*, 70 - 84.
- Berita*. (2017, Oktober 11). Retrieved from Kompas: <http://www.kompas.com/>
- Berita*. (2021, Agustus 6). Retrieved from Tribun Aceh: <http://aceh.tribunnews.com/>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joel S. Hellman, Geraint Jones, Daniel Kaufmann. (2000). *“Seize the State, Seize the Day” State Capture, Corruption, and Influence in Transition*. Europe and Central Asia Region: World Bank.
- Kartono, K. (2018). *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mansyur, A. Y. (2013). Personal Prophetic Leadership Sebagai Model Pendidikan Karakter Bersifat Intrinsik Atasi Korupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1.
- News*. (2017, Oktober 11). Retrieved from BBC: [bbc.com](http://bbc.com)
- News*. (2021, Agustus 4). Retrieved from Tell The Truth Nusa Daily: [nusadaily.com](http://nusadaily.com)

- Patilima, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pringle, P. (2001). *Top 10 Qualities of Great Leader, Pearson Horizon Editions*. Toronto: Harrison House LLC.
- Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, V. (2007). *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salama, N. (2014). "Motif dan Proses Psikologis Korupsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. *Jurnal Psikologi*, 149-164.
- Sanapiah, F. (1990). *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi)*. Malang: Ya3Malang.